

ANALISIS FRAMING KASUS DWI KEWARGANEGARAAN ARCANDRA TAHAR DI KORAN KOMPAS

Masita¹, Syamsuddin Aziz², Andi Subhan Amir³

¹²³Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin

Abstract

This study aim to examine how KOMPAS daily frame dual citizenship case of Arcandra Tahar. Qualitative research method apply in this study and employ framing analysis by Zhongdang Pan and Gerald M. Kosicki Model through seven news story in August 2016 regard to dual citizenship case of Arcandra Tahar. The result showed that : (1) The government has victimized Arcandra as foreign, (2) Arcandra consider as purely Indonesian citizen, (3) The case has ruined the government's credibility.

Keywords : analysis framing; citizenship; KOMPAS

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana framing yang dilakukan oleh harian KOMPAS terkait kasus dwi kewarganegaraan Arcandra Tahar. Penelitian ini memakai metode penelitian kualitatif dengan melakukan analisis framing model Zhongdag Pan dan Gerald M. Kosicki terhadap tujuh berita yang memuat diskursus mengenai kewarganegaraan ganda Arcandra Tahar di harian KOMPAS selama bulan agustus 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Arcandra dicitrakan sebagai korban dari pemerintah terkait kasus kewarganegaraan gandanya, (2) Arcandra dicitrakan sebagai orang yang layak untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia, (3) KOMPAS menyajikan kasus ini sebagai kasus yang menjatukan kredibilitas pemerintah.

Kata Kunci : analisis framing; kewarganegaraan; KOMPAS

PENDAHULUAN

Penelitian ini menggunakan konsep paradigma konstruktivis untuk menganalisis fenomena media; Media dipahami sebagai lembaga yang mengkonstruksi fenomena sosial dan mempublikasikannya kepada khalayak sebagai berita. Proses konstruksi ini dipahami merupakan upaya media untuk mengarahkan khalayaknya untuk berpikir dan mengarahkan apa yang seharusnya dipikirkan (*to think and what to think about*, McComb, 1972).

Pengaruh ini dapat dianggap sebagai bukti bahwa media dapat melakukan penetrasi ke persepsi publik. Secara teknis, media mudah diakses, murah dan tersedia dalam beragam bentuk cetak maupun elektronik (*online*). Menurut Harold Laswell (1972), pengaruh media terkait dengan

fungsi mereka: untuk menginformasikan, mendidik, dan menghibur. Fungsi ini juga dinggambarkan dengan jelas dalam Undang-Undang Pers Indonesia tahun 1999.

Media merepresentasikan realitas yang ada di masyarakat dan menyampaikannya kepada khalayak dengan cara tertentu berdasarkan kaidah-kaidah jurnalisme (Tuchman, 1972). McCombs dalam tulisannya *The Agenda Setting Role of the Mass Media in Shaping Public Opinion* (2003) menyebutkan bahwa apa yang kita ketahui tentang dunia sebagian besar didasarkan pada apa yang media putuskan untuk diberitahu ke publik; Hal prioritas oleh media akan menjadi isu-isu prioritas oleh masyarakat (lihat McCombs, 1972).

Lippman (1992) dalam karyanya *Opini Publik* mengatakan bahwa media adalah sumber utama arus informasi yang mendominasi pikiran masyarakat. Dalam banyak kasus, proses mendominasi pikiran masyarakat ini berhubungan dengan urusan publik, misalnya, bagaimana pengaruh media kepada orang-orang untuk berpikir tentang pentingnya pemilihan kepala daerah merupakan aplikasi dari konsep ini.

Dengan demikian, media mempengaruhi bagaimana orang bereaksi dan terhadap pengambilan keputusan. Peneliti, Zhongdang Pan (1993) dan Robert M Entman (1993) menganalisis bagaimana media menyusun beritanya dan merumuskannya sebagai teori. Mereka berpendapat bahwa media membingkai realitas yang terjadi dan menyebarkan ke khalayak. Proses pembingkai (*framing*), yang diterjemahkan sebagai bagaimana media memilih dan menonjolkan isu tertentu, menjadi strategi yang efektif untuk mempengaruhi khalayak atau pengambilan kebijakan publik. Misalnya, ketika media selalu melaporkan kasus korupsi, publik akan menjadi kurang percaya kepada pejabat.

Penelitian ini mencoba melihat bagaimana media membingkai diskursus dwi kewarganegaraan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arcandra Tahar selama yang diberitakan di Agustus 2016. Arcandra Tahar secara masif di beritakan diberbagai media baik lokal maupun nasional terkait status dwi kewarganegaraan saat masih menjabat sebagai menteri ESDM. Presiden Jokowi Dodo akhirnya memutuskan untuk memberhentikan

Arcandra Tahar sebagai menteri ESDM pada 15 Agustus 2016.

Diskursus ini menjadi penting karena kontra dengan Undang-Undang dan dialami oleh pejabat penting di pemerintahan. Selain itu, masalah ini telah membuat Arcandra memecahkan periode terpendek masa jabatan menteri di Indonesia. Semua ini diterbitkan di *KOMPAS*.

Peneliti memilih Koran *KOMPAS* karena media ini merupakan salah satu media terbesar dan terbaik (*quality newspaper*) di Indonesia yang tidak berafiliasi kepada sa;ah satu partai politik atau pemerintahan. Disamping itu *KOMPAS* juga merupakan media yang kritis terhadap kebijakan pemerintah. Salah satunya terlihat pada artikel kedua yang membahas tentang kasus Dwi Kewarganegaraan Arcandra yakni '*Administrasi Negara Ceroboh*'.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana koran *KOMPAS* mengonstruksi kasus dwi kewarganegaraan Arcandra Tahar.

Strategi analisis data mengikuti empat langkah analisis framing oleh Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki (1993). Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut.

Pertama, satu persatu berita dianalisis dengan struktur Sintaktikal. Kedua, satu persatu berita dianalisis dengan melihat struktur skripnya. Ketiga, satu persatu berita dianalisis berdasarkan struktur tematik. Keempat, satu persatu berita akan dianalisis berdasarkan struktur retorik.

METODE

Penelitian ini menggunakan analisis framing model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki terhadap tujuh artikel berita

terkait dwi kewarganegaraan Arcandra Tahar yang terbit pada bulan agustus.

Zongdhang Pan dan Gerald Kosicki (1993) dalam tulisan mereka *Framing Analysis: An Approach to News Discourse* menyatakan bahwa framing adalah strategi dan memproses news discourse (wacana berita). Framing didefinisikan sebagai proses membuat suatu pesan lebih menonjol, menempatkan informasi lebih daripada yang lain sehingga khalayak tertuju pada pesan tersebut.

Pan dan Kosicki mengklasifikasikan perangkat framing ke dalam empat kategori yaitu struktur, sintaksis, struktur skrip, struktur tematik dan struktur retorik.

Struktur sintaksis mengacu pada pola penyusunan kata atau frase menjadi kalimat. Ini ditandai dengan struktur piramida terbalik dan pemilihan narasumber. Keberadaan struktur sintaksis dalam sebuah berita menggiring khalayak kepada sebuah perspektif tertentu dalam memandang sebuah peristiwa.

Struktur skrip mengacu pada tahapan-tahapan kegiatan dan komponen dari sebuah peristiwa. Secara umum, teks berita terdiri dari 5W dan 1H (what, who, where, when dan how). Kehadiran struktur skrip dalam sebuah berita bisa memberi kesan bahwa berita tersebut unit yang relative independen, karena menyajikan informasi yang lengkap dari sebuah peristiwa, mulai dari awal, klimaks, karakter dan emosi manusia.

Struktur tematik adalah susunan hierarki dengan sebuah tema sebagai inti yang menghubungkan sejumlah subtema, yang pada gilirannya dihubungkan dengan elemen-elemen pendukung. Struktur tematik

ini terdiri dari ringkasan dan bagian utama. Ringkasan biasanya dipresentasikan melalui headline, lead, atau kesimpulan. Sedangkan bagian utama merupakan tempat di mana bukti-bukti pendukung disajikan, baik berupa peristiwa itu sendiri, latar belakang informasi atau kutipankutipan.

Struktur retorik menggambarkan pilihan gaya yang dibuat oleh jurnalis sehubungan dengan efek yang mereka harapkan dari sebuah peristiwa terhadap khalayak. Mereka menggunakan perangkat framing untuk menggambarkan observasi dan interpretasi mereka sebagai sebuah fakta atau untuk meningkatkan efektivitas sebuah berita.

HASIL

Tabel 1. Pemberitaan kasus dwi kewarganegaraan Arcandra Tahar di *KOMPAS*

No	Judul	Waktu Penerbitan
1	Reputasi Presiden Jadi TaruhanPresident	14 Agustus 2016
2	State Administrative Reported Careless	15 Agustus 2016
3	Kasus Arcandra Tahar Jadi Pelajaran	16 Agustus 2016
4	Arcandra Tak Mudah di Mintai Keterangan	16 Agustus 2016
5	Kehati-hatian di Butuhkan	18 Agustus 2016
6	DPR Tawarkan Persetujuan	19 Agustus 2016
7	Transnasionalisme dan Jalan Pintas	20 Agustus 2016

Analisis Berita 1

Secara sintaksis, judul dari artikel ini menggambarkan kasus Arcandra Tahar sebagai ancaman bagi nama baik presiden. Begitu krusialnya kasus dwi kewarganegaraan Arcandra Tahar secara langsung bisa meruntuhkan nama baik Jokowi Dodo.

Secara struktur *skrip*, Struktur organisasi kalimat dalam artikel ini terlihat tidak terstruktur. Mengingat bahwa ini adalah berita pertama di *KOMPAS* terkait Archndra Tahar, sangat penting di paragraph awal dijelaskan secara terperinci permasalahan pokok yang sedang terjadi.

Secara struktur *tematik*, artikel ini mengajak pembaca untuk memahami bahwa Indonesia tidak memperbolehkan warganya memiliki dwi kewarganegaraan. Secara simultan, lima paragraf berturut-turut membahas hal ini. Paragraf pertama membahas tentang tuduhan dwi kewarganegaraan Arcandra dan tuntutan kepada pihak berwenang agar memberikan klarifikasi.

Pada struktur *retoris*, artikel ini berusaha untuk memantik pemerintah agar segera mengklarifikasi kasus Arcandra Tahar. Hal ini terlihat pada pengguna kata 'harus' pada paragraf pertama untuk menekankan maksud yang ingin disampaikan oleh media kepada pemerintah. Penggunaan kata ini menggiring pembaca untuk melihat kasus ini sebagai kasus yang serius sehingga membutuhkan langkah cepat.

Analisis Berita 2

Secara strukur sintaksis, dengan mengamati judul dan *lead*, artikel ini sepenuhnya menyalahkan administrasi

negara yang ceroboh dan tidak sinergi dalam melakukan verifikasi atas kasus dwi kewarganegaraan Arcandra Tahar, padahal saat berita ini diturunkan belum ada konfirmasi resmi dari pemerintah akan status Arcandra Tahar. Oleh sebab itu, berita ini menjadi begitu judgemental dan tidak disertai bukti-bukti akurat. *KOMPAS*, dalam artikel ini memberikan dukungan kepada Arcandra dengan mengungkit masalah administrasi.

Berdasarkan struktur skrip, terlihat bahwa truktur organisasi dalam artikel ini berusaha untuk memberikan wadah bagi sebanyak-banyaknya pihak yang berwenang untuk berkomentar terkait kasus ini. Keseluruhan naskah adalah opini.

Secara struktur tematik, artikel dibuka dengan tuduhan akan kecerobohan negara yang kemudian di dukung dengan dua paragraf selanjutnya. Sehingga akan terbentuk satu garis utama pembicaraan atau fokus dari bahasan artikel ini yakni menyalahkan negara.

Pada struktur *retoris*, penggunaan kata 'mencerminkan' (diikuti dengan kata "kecerobohan negara") memiliki arti bahwa negara merefleksikan, menampakkan, atau menunjukkan sikap-sikap ceroboh dalam mengemban amanah dari rakyat. Keseluruhan kata ini akan mengindikasikan bahwa negara tidak melakukan tugasnya dengan baik sebagaimana harusnya. Selain itu penggunaan kata kecerobohan sebanyak tiga kali menekankan bahwa kata ini ingin ditanamkan ke benak pembaca.

Analisis Berita 3

Secara sintaksis, judul dari artikel ini secara tidak langsung menggiring pembaca

untuk melihat pemerintah sebagai pihak yang bersalah, oleh karenanya dari kesalahan tersebut pemerintah harus menjadikan kasus ini sebagai pelajaran agar lebih berhati-hati dan tidak mengulang kesalahan yang sama.

Pada struktur skrip, walaupun pengumuman pemberhentian Arcandra terjadi pada tanggal 15 Agustus malam hari, artikel ini tidak dibuat oleh penulis dalam bentuk straight news dan diterbitkan pada tanggal 16 Agustus. Dimana pada berita yang berbentuk straight news, keterangan mengenai waktu dan tempat dipaparkan di awal paragraph namun awal paragraf dari berita ini memasukkan opini penulis yang juga merupakan judul beritanya. Sehingga pembaca akan langsung diarahkan untuk mencerna opini penulis kemudian melihat runtutan pengumuman pemberhentian Arcandra Tahar. Hal ini akan menyebabkan pembaca bisa saja telah menarik kesimpulan terlebih dahulu dengan membaca opini penulis.

Dari segi struktur tematik, artikel ini mencoba memperlihatkan bahwa pemberhentian Arcandra Tahar dari jabatannya adalah pilihan bijak dari pemerintah dan harusnya di sambut baik. Di susul dengan paragraph-paragraf selanjutnya yang mendukung hal ini. Misalnya komentar dari pemuka agama yang menghargai keputusan pemerintah dan mengatakan bahwa ini merupakan pertanggungjawaban yang positif untuk menunjukkan ada akuntabilitas public.

Pada struktur retorik, penggunaan kata '*diduga memiliki kewarganegaraan Amerika Serikat*' pada paragraf kelima bisa membuat

pembaca untuk berfikir bahwa Arcandra memang memiliki dwi kewarganegaraan.

Kata '*beban*' pada paragraf terakhir mengindikasikan bahwa keputusan yang diambil oleh presiden telah tepat mengingat bahwa jika tetap menjabat sebagai menteri, jika Arcandra mengambil keputusan yang yang berbau AS, maka bisa jadi tangkapan publik akan berbeda.

Analisis Berita 4

Jika dilihat dari segi unsur sintaksis, judul artikel ini telah merangkum apa yang dipaparkan dalam artikel. Rentetan aktifitas dari wartawan yang mencoba untuk mendapatkan keterangan dari Arcandra, menjadi latar informasi dari berita ini. Dengan menggunakan judul "Arcandra Tak Mudah di Mintai Keterangan" berusaha untuk menggambarkan bahwa mereka telah berusaha untuk meminta keterangan langsung kepada Arcandra namun tak mendapatkan hasil.

Dari struktur skrip, artikel ini merupakan bentuk berita straight news. Jika dilihat dari kelengkapan unsur berita 5W+1H, penulis tidak menyertakan unsur *Why*, sehingga kesan bahwa Arcandra sedang menghindar dari pers semakin terasa. Ditambah dengan penjelasan dari wartawan bahwa kiriman pesan whatsapp nya hanya di baca namun tidak dibalas. Secara tematik, artikel ini secara garis besar membahas tentang bagaimana sulitnya untuk menemui Archanda. Keseluruhan paragraf mendukung hal ini misalnya ketika wartawan mendatangi dua rumah namun tidak bisa menemukan Arcandra.

Pembuktian yang dilakukan oleh wartawan bahwa Arcandra sulit untuk

dimintai keterangan adalah usaha yang diperlihatkan wartawan melalui wawancara dengan ajudan yang ada di rumah dinas Arcandra. Namun wawancara tersebut tidak memuaskan pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh wartawan.

Secara struktur retorik, penggunaan kata lengang menunjukkan bahwa tidak ada aktifitas berarti yang terjadi di rumah dinas Arcandra sehingga wajar saja jika wartawan tidak bisa bertemu dengan Arcandra.

Penggunaan kata tidak aktif menunjukkan bahwa Arcandra tidak bisa dihubungi wartawan dan tidak bisa meminta keterangan langsung dari Arcandra mengenai pemberhentiannya sebagai menteri ESDM.

Analisis Berita 5

Judul artikel berita ini yang ditulis 'Kehati-hatian di Butuhkan', mengindikasikan dua hal. Yang pertama adalah, menilik kasus menteri ESDM sebelumnya, maka pemerintah harus hati-hati memilih menteri ESDM baru agar tidak terjadi kesalahan yang serupa yakni cacat administrasi. Kedua, yang menggantikan Arcandra haruslah seseorang yang memiliki nilai yakni berintegritas dan bebas dari kepentingan yang merugikan negara.

Dari segi unsur skrip, artikel ini sebagian besar dibangun dari sisi opini penulis. Utamanya pada tiga paragraf pertama yang berisi tentang syarat yang harus dipenuhi oleh pengganti Arcandra dan pencatatan informasi mengenai pengelolaan proyek besar seperti blok Masela dan perpanjangan kontrak Freeport. Opini penulis ini berupaya untuk menggiring pembaca bahwa posisi menteri ESDM

bukanlah posisi main-main atau merupakan kursi yang harus dipegang ol

eh orang yang amanah dan bertanggung jawab. Untuk itu, penulis disini berusaha untuk menyampaikan kepada masyarakat dan pemerintah bahwa mereka tidak boleh asal-asalan dalam memilih pengganti Arcandra.

Dari segi unsur tematik, artikel ini memiliki dua tema besar yakni pengganti Arcandra taha dan juga memiliki dua sub tema. Subtema pertama yakni terdapat pada subheadline pertama penulis membahas tentang syarat yang diajukan untuk menteri ESDM baru yang merupakan opini penulis. Subtema kedua yakni penulis menjabarkan beberapa pernyataan bahwa Arcandra masih bisa bekerja untuk negeri.

Dari segi retorik, foto dari naskah berita ini menampilkan Arcandra yang sedang menggulung lengan bajunya dan sedang ingin mengambil wudhu untuk shalat. Dalam kerangan gambar tersebut Arcandra sedang melihat ke arah wartawan. Gambar ini memberikan makna bahwa Arcandra merupakan orang yang taat melakukan ibadah. Namun disisi lain gambar ini memberikan jarak antara Arcandra dan wartawan yang juga berarti bahwa Arcandra masih di luar jangkauan untuk dimintai keterangan bagi wartawan.

Analisis Berita 6

Secara sintaksis, judul artikel ini menekankan kemungkinan Arcandra dalam mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. *KOMPAS* berniat untuk menyampaikan pembaca bahwa Arcandra bisa menjadi warga negara Indonesia melalui DPR.

Lead pada artikel ini mencakup keseluruhan apa yang diinginkan di sampaikan penulis kepada pembaca. Pada bagian *lead* penulis berusaha untuk menggiring pembaca untuk memahami bahwa yang menjadi kunci utama dari kembalinya status kewarganegaraan Arcandra adalah Presiden Joko Widodo. Ketika presiden meminta pertimbangan kepada DPR, maka DPR bersedia untuk mengembalikan status kewarganegaraan Arcandra. Hal ini pernah dilakukan sebelumnya pada beberapa orang seperti Nicolass Jouwe, Hasan Tiro, Hasan Zaini, Christian Gonzales, Irfan Bahdin, dan Kim Jeffrey Kurniawan.

Skrip dari naskah ini berusaha untuk menjabarkan kemungkinan kembalinya status kewarganegaraan Arcandra. Tahar, contoh-contoh kasus naturalisasi, kejelasan status kewarganegaraan Arcandra serta kehati-hatian pemerintah dalam memilih pengganti Arcandra. Cara penyampaian yang dilakukan penulis, cukup untuk menyakinkan pembaca bahwa masih ada jalan bagi Arcandra untuk berkontribusi bagi negeri. Hal ini terlihat dari pemberi komentar yang merupakan orang-orang yang berkompeten memberikan solusi. Memasukkan penjelasan mengenai undang-undang juga semakin memperjelas kemungkinan kembalinya status WNI Arcandra.

Secara tematik, paragraf pertama artikel ini telah menjelaskan apa yang dimaksud pada judul. Dalam artikel ini, secara garis besar penulis ingin memberitahu bahwa masih ada jalan bagi Arcandra untuk bisa duduk di kursi pemerintah. Mengacu pada hal ini, tersirat bahwa Arcandra merupakan sosok yang

penting sehingga menjadi bahan serius untuk dicari solusi. Pengembalian status WNI Arcandra di sampaikan dalam naskah sebagai sesuatu yang mudah, misalnya mengacu pada kasus netralisasi pemain sepakbola. Hal ini juga dibuktikan dengan pernyataan dari ketua DPR yang mempersilahkan pemerintah untuk mengajukan hal tersebut. Buktinya juga ditunjukkan dengan pernyataan ketua DPR yang memungkinkan pemerintah untuk mengajukan permintaan ke DPR. Ini dinyatakan oleh Ade Kamaruddin, Kepala DPR bahwa pemerintah bisa mengusulkan permintaan, kemudian komisi terkait akan menyetujuinya.

Secara retorik, penggunaan kata 'dijernihkan' pada paragraf keempat kalimat 'masalah ini bisa dijernihkan' mengandung arti bahwa kasus dwi kewarganegaraan Arcandra bisa diatasi melalui cara-cara yang telah dilakukan sebelumnya.

Analisis Berita 7

Secara *sintaksis*, menunjukkan hubungan antara transnasionalisme dan 'jalan pintas', dijelaskan oleh penulis sebagai cara untuk mendapatkan dwi kewarganegaraan. Kata 'Transnasionalisme' tidak diatur dalam kamus bahasa Indonesia yang besar tetapi jika dilihat dari bahasa Inggris, kata itu berarti transisi kewarganegaraan. Penggunaan kata ini, dapat ditangkap oleh pembaca sebagai dilema perpindahan kewarganegaraan di era globalisasi ini, terutama terkait kasus kewarganegaraan Arcandra.

Secara *skrip*, Keseluruhan naskah disusun oleh opini penulis, hanya ada satu

kutipan dari keseluruhan naskah. Organisasi naskah artikel ini sebagian besar merupakan narasi dari penulis. Paragraf awal penulis menjabarkan tentang bagaimana polemik kewarganegaraan yang dialami oleh WNI yang berada di luar negeri. Kemudian di pertengahan artikel, penulis menggambarkan beberapa solusi yang bisa dilakukan terkait hal ini yakni dengan merevisi atau menghapus UU No 12/2006 tentang Kewarganegaraan. Di akhir naskah, penulis menjabarkan beberapa negara yang tidak mengizinkan kewarganegaraan ganda namun memiliki peraturan khusus mengenai kewarganegaraan warganya yang tinggal diluar negeri untuk memudahkan mereka dalam membangun negaranya.

Secara tematik, paragraf pertama artikel ini, mencakup keseluruhan berita secara tematik yakni bagaimana transnasionalisme berhubungan dengan emigrasi, diaspora dan pembangunan Indonesia. Penulis menggiring pembaca untuk memahami bagaimana beberapa negara telah menggunakan dwi kewarganegaraan untuk membangun negara dan membuka peluang bagi talenta-talenta negara yang berada di luar negeri untuk bisa kembali memberikan kontribusi bagi negaranya. Dalam artikel juga di sebutkan bahwa pemberian dwi kewarganegaraan bisa menghalau perpindahan 'otak' cemerlang dari negara berkembang ke negara maju akibat dari upah tinggi dan fasilitas yang memadai.

Pada struktur retorik, Artikel ini disertai dengan gambar negara-negara yang mengizinkan dwi kewarganegaraan dan tidak mengizinkan dwi kewarganegaraan. Gambar ini memberikan detail lokasi mayoritas pemberi legalitas kewarganegaraan

ganda. Di gambar bisa di lihat bahwa mayoritas yang memberikan kewarganegaraan ganda adalah di benua Eropa dan Australia, sedangkan yang tidak mengizinkan dwi kewarganegaraan adalah mayoritas dari benua Asia. Dalam artikel ini juga di berikan tabel rinci mengenai nama negara-negara yang mengizinkan ataupun tidak mengizinkan dwi kewarganegaraan.

PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis yang telah disebutkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa KOMPAS membingkai dwi kewarganegaraan dari Arcandra melalui tujuh artikel yang terdiri dari tiga frame: (1) Pemerintah telah menjadikan Arcandra korban dalam kasus dwi kewarganegaraan, (2) Arcandra diperhitungkan sebagai warga negara Indonesia (salah satu warga yang paling menonjol dari Indonesia), (3) kasus ini telah merusak kredibilitas pemerintah.

(1) KOMPAS mem-frame pemerintah sebagai lembaga yang menyebabkan polemik kasus dwi kewarganegaraan Arcandra sementara Arcandra menjadi korban oleh sistem tidak profesional. Pemerintah dipandang sebagai institusi yang mempunyai kekuatan besar, yang menjadi sumber masalah (menurut UU dan penjelasan melalui artikel 'Administrasi Negara Ceroboh'), di sisi lain pemerintah juga menjadi solusi untuk kasus dwi kewarganegaraan Arcandra ini. Pada puncak kasus ini, Arcandra dipotret sebagai korban dari kelalaian pemerintahan serta tidak bertanggung jawab terhadap tugasnya. Terkait pemecatan Arcandra, penggunaan kata 'Dengan Hormat' berulang kali, negara memposisikan Arcandra sebagai orang

terhormat, tapi sayangnya, dia harus diberhentikan karena kecerobohan pemerintah dan keharusan untuk melaksanakan UU. Hal ini menekankan bagaimana Arcandra layak dikatakan 'korban'.

(2) KOMPAS membingkai Arcandra sebagai seseorang yang harus berkewarganegaraan Indonesia. KOMPAS berulang kali (lebih dari tiga artikel) menjelaskan solusi untuk pemerintah terkait bagaimana Arcandra mendapatkan kewarganegaraan Indonesia sementara ia sudah diberhentikan sebagai menteri. KOMPAS ingin Arcandra menjadi orang Indonesia dan menunjukkan harapan besar untuk bisa berkontribusi untuk Indonesia. Di samping itu, Arcandra ditampilkan sebagai orang yang baik dan sosok yang luar biasa yang layak untuk berkewarganegaraan Indonesia.

(3) Menurut dua hasil di atas, KOMPAS mempublikasikan kasus ini sebagai insiden yang merusak kredibilitas pemerintah. KOMPAS menjadi 'watch dog' untuk pemerintah terkait keputusannya dan menyalahkan pemerintah karena kasus dwi kewarganegaraan Arcandra. Kasus ini telah menjadi wacana yang memerlukan penjelasan yang mendalam dan cepat. KOMPAS sebagai koran nasional berkontribusi dalam menjawab pertanyaan publik ini dengan memposisikan kasus ini sebagai tanggung jawab pemerintah.

Dalam literatur review, telah dijelaskan bahwa media tidak mencerminkan realitas tetapi melakukan konstruksi pada makna yang ingin di sampaikan (pekerja, rutinitas organisasi, faktor eksternal, dan ideologi). Berita tentang Arcandra juga dilihat sebagai cerita yang dibangun oleh pekerja Media

yang menekankan beberapa aspek terpilih. Media agenda memposisikan Arcandra sebagai korban dibangun oleh media dan menekankan arti tersebut.

Menurut Pan dan Kosicki dalam literatur review yang mengatakan bahwa berita itu memiliki bingkai sendiri yang juga disebut tema, terlihat dalam tujuh berita Arcandra di KOMPAS. Hal ini dapat dilihat melalui empat elemen, analisis yang digunakan (sintaksis, script, thematical dan retorik) yang membantu penulis untuk melihat seluruh kerangka KOMPAS dalam memberitakan Arcandra.

Berikut adalah analisis berita KOMPAS berdasarkan analisis elemen yang digunakan.

Dari segi Sintaksis, KOMPAS menggunakan judul dan lead yang cenderung menyalahkan pemerintah atas kasus Arcandra dan membuat citra pemerintah sebagai institusi yang bertanggung jawab atas dwi kewarganegaraan Arcandra. KOMPAS berusaha untuk menyajikan berita yang mendekati netralitas dan objektifitas dengan menggunakan variasi sumber wawancara dan memasukkannya dalam kutipan. Diantaranya adalah mengambil opini dan pernyataan ahli akademisi ataupun tokoh politik (Sekretaris Negara, Menteri Hukum dan HAM, anggota DPR), pemerintah, bahkan tokoh agama (ketua Nahdlatul Ulama, PP Muhammadiyah dan Sekertaris Umum PP Muhammadiyah). Walaupun dari segi komentar pemerintah, Arcandra selalu diposisikan sebagai Warga Negara Indonesia, tak ada penjelasan detail mengenai status Arcandra yang sebenarnya. Pada acara jumpa pers yang diliput

KOMPAS tanggal 16 Agustus, tak ada keterangan dari pemerintah tentang status kewarganegaraan Arcandra. Hal inilah yang menguatkan pendapat-pendapat ahli (baik akademisi ataupun pengamat) yang menyalahkan negara.

Dari segi skrip, KOMPAS, dalam membangun berita, penulis memasukkan opininya di awal berita kemudian didukung oleh pendapat ahli. KOMPAS juga mengajak pembaca untuk memahami banyak sudut pandang oleh salah satu tersedia sampai tiga sub judul.

Dari segi Tematik, KOMPAS mengajak pembaca untuk memahami bahwa dwi kewarganegaraan adalah hal yang illegal di Indonesia. Di sisi lain, KOMPAS tetap mendukung Arcandra untuk tetap berkiprah di Indonesia, namun harus melalui mekanisme yang telah ditentukan oleh hukum. Secara garis besar, KOMPAS ingin menyampaikan kepada pembaca bahwa hukum harus tegas kepada semua elemen masyarakat.

Dari segi Retoris, KOMPAS menggunakan kata-kata yang menyalahkan pemerintah, mendesak pemerintah, dan menghormati/menghargai sosok Arcandra. KOMPAS juga tidak menggunakan foto seperti foto Arcandra, Foto Pratikno saat jumpa pers ataupun grafik UU Kewarganegaraan secara berlebihan.

KESIMPULAN

Analisis framing terkait dwi kewarganegaraan Arcandra Tahar di KOMPAS dapat disimpulkan sebagai: (1) Pemerintah di-frame telah menjadikan Arcandra sebagai korban dari kasus dwi kewarganegaraan. Pemerintah dibingkai

sebagai lembaga besar yang memiliki kekuatan untuk menyetir kasus ini. Sementara Arcandra, di frame sebagai orang yang tidak memiliki kekuatan. (2) KOMPAS membingkai Arcandra sebagai seseorang yang layak untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. (3) Secara garis besar, KOMPAS menyajikan kasus ini sebagai kasus yang telah merusak kredibilitas pemerintah dalam menjalankan tugasnya.

DAFTAR RUJUKAN

- Berger P.L & Thomas Luckmann. 1991. *The Social Construction of Reality*. Inggris : Pinguin Book.
- Lasswell, H.D. 1971. *Politic as Symbolic Action*. London : Akademik Press.
- McCombs, M & Donald L. Shaw. The Agenda-Setting Function of Mass Media. *'The Public Opinion Quarterly, Vol.36, No.2. (Summer 1972), pp. 176-187.*
(<http://links.jstor.org/sici?sici=0033-362X%28197222%2936%3A2%3C176%3ATAFOMM%3E2.0.CO%3B2-5>, diakses pada 15 Februari 2016).
- McCombs, M. 2003. *The Agenda-Setting Role of the Mass Media in the Shaping of Public Opinion*. www.infoamerica.org/documentos_pdf/mccombs01.pdf. Diakses pada tanggal 1 Oktober 2016.
- McCombs, Maxwell & Sebastián Valenzuela. 2007. 'The Agenda-Setting Theory'. Cuadernos de Información, núm. 20, julio, 2007, pp. 44-50. (redalyc.org, diakses pada 15 Februari 2017).

- Moss, Peter D. 1999. Conflict and Containment in Television News: A Case Study . Dalam Mary S. Mander (ed.). *Framing Friction*. Urbana: University of Illinois Press.
- Pan, Z dan Kosicki, G. 1993. Framing Analysis : *An Approach to News Discourse*. United Kingdom : Taylor & Francis Persada.
- Reese S.D. dkk. 2001. *Framing Public Life*. London : Lawrence Erlbaum Associated, Publisher.
- Reese, Stephen D. 2007. Media Production and Content. (<https://journalism.utexas.edu/sites/journalism.utexas.edu/files/attachments/reese/ica-encyclopedia-media-production-content.pdf>, diakses pada 15 Februari 2017).
- Reese, Steven. 2007. *Journalism Research and The Hierarchy of Influences Model : A Global Prespective*. USA : University Of Texas.
- Shoemaker P.J. & Stephen D. Reese. 2014. *Mediating the Message in the 21st Century*. Edisi Ketiga. Abingdon : Routledge.
- Shoemaker, Pamela J & Stephen D. Reese. 1991. *Mediating The Message : Theory of Influences on Mass Media Content*. Edisi Kedua. USA : Longman Publisher.
- Tuchman, Gaye. 1973. Making Newsby Doing Work: Routinizing the Unexpected. '*American Journal of Sociology, Vol. 79, No. 1 (Jul., 1973), pp. 110-131*'. (<http://www.jstor.org/stable/2776714> , diakses pada 15 Februari 2017).